



# Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Melalui Peran Organisasi di Perguruan Tinggi

Anis Maslihah<sup>1</sup>, Romi Faslah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: [anismaslihah656@gmail.com](mailto:anismaslihah656@gmail.com), [romi@uin-malang.ac.id](mailto:romi@uin-malang.ac.id)

| Article Info  | Abstract  |
|---|---|
| <b>Article History</b><br>Received: 2025-05-13<br>Revised: 2025-06-23<br>Published: 2025-07-08                          | The implementation of Internal Quality Assurance System (SPMI) in higher education is a systematic effort to ensure the quality of education in a sustainable manner. This article aims to analyze the concept of Internal Quality Assurance System (SPMI), the role of campus organizations in its implementation, as well as the challenges and strategic solutions needed. Through a qualitative-descriptive approach based on literature studies, this article concludes that the success of the Internal Quality Assurance System (SPMI) is determined by the synergy between the quality assurance institution (LPM), quality implementation unit (UPM), faculty, study programs and active student organizations, and university leaders. Despite facing obstacles such as limited resources and resistance to change, the implementation of a structured IQAS is able to encourage continuous improvement in the quality of higher education. Effective implementation of IQAS will strengthen the culture of quality, increase accountability, and produce graduates who are competent and adaptive to the development of the times. |
| <b>Keywords:</b><br><i>Implementation of Internal Quality Assurance System; Role of Organization; Higher Education.</i> |   |

| Artikel Info   | Abstrak  |
|--|--|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2025-05-13<br>Direvisi: 2025-06-23<br>Dipublikasi: 2025-07-08              | Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan upaya sistematis untuk menjamin kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), peran organisasi kampus dalam implementasinya, serta tantangan dan solusi strategis yang diperlukan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditentukkan pada sinergi antara lembaga penjaminan mutu (LPM), unit pelaksana mutu (UPM), Fakultas, program studi serta organisasi aktif mahasiswa, dan pimpinan perguruan tinggi. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi perubahan, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terstruktur mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang efektif akan memperkuat budaya mutu, meningkatkan akuntabilitas, dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. |
| <b>Kata kunci:</b><br><i>Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal; Peran Organisasi; Perguruan Tinggi.</i> |  |

## I. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, relevan, dan mampu bersaing di era global. Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi harus memiliki sistem yang mampu menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan, salah satunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal. (Najwa, Iqbal, and Aryani 2023) Dalam pelaksanaannya, implementasi SPMI sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja organisasi-organisasi di dalam kampus, seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), fakultas, program studi, dan unsur pimpinan. Peran aktif organisasi ini menentukan keberhasilan pengendalian mutu yang komprehensif dan berkelanjutan.

Mutu pendidikan tinggi merupakan isu sentral dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan di perguruan tinggi, seperti proses pembelajaran yang belum optimal, layanan akademik yang belum terstandar, serta lemahnya pelibatan sivitas akademika dalam proses penjaminan mutu. (Harahap et al. 2023)

perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan birokrasi struktural dalam menjamin mutu, tetapi juga memberdayakan seluruh elemen

kampus, termasuk organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) hadir sebagai mekanisme formal yang dirancang untuk mengontrol dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). (Mulyasa and Aryani 2022) Namun, keberhasilan implementasi SPMI tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga penjaminan mutu (LPM) dan unit penjaminan mutu (UPM), melainkan juga pada partisipasi aktif berbagai organisasi kampus, baik yang bersifat struktural maupun kemahasiswaan.

Organisasi-organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta organisasi keagamaan dan pers mahasiswa, memiliki posisi strategis sebagai agen partisipatif dan evaluatif. Mereka dapat memberikan masukan, kritik konstruktif, serta menjadi jembatan antara mahasiswa dan pengelola perguruan tinggi dalam menyuarakan kebutuhan dan ekspektasi terhadap layanan pendidikan. (Marjohan, Englita, and Lukman 2023) Sayangnya, peran organisasi-organisasi ini dalam mendukung implementasi SPMI masih belum optimal dan kurang mendapat perhatian dalam berbagai studi sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Najwa dkk. (2023) (Najwa, Iqbal, and Aryani 2023) dan Gofur dkk. (2023) (Gofur, Qomusuddin, and Romlah 2023) lebih banyak membahas desain manajemen mutu internal secara institusional, namun belum banyak menyoroti secara spesifik keterlibatan organisasi kampus sebagai aktor pendukung. Padahal, keberhasilan penjaminan mutu sangat bergantung pada budaya mutu yang dibangun secara kolektif dan partisipatif.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengangkat peran organisasi-organisasi kampus dalam mendukung implementasi SPMI secara komprehensif. Kajian ini menjadi penting, tidak hanya untuk memperluas cakupan teori implementasi SPMI, tetapi juga untuk memberikan gambaran praktis bagaimana organisasi kampus dapat menjadi kekuatan sosial dalam mengawal mutu pendidikan tinggi yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang

diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Zed menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan cara yang efektif untuk memperoleh teori dan pandangan para ahli sebagai dasar dalam membangun kerangka pemikiran dan analisis terhadap suatu permasalahan. (Hardadi 2020) Sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Artikel jurnal ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 53 UU Dikti menyatakan bahwa SPMI Dikti terdiri dari SPMI yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan SPME yang dilakukan melalui akreditasi. Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI dijelaskan sebagai rangkaian unsur dan proses yang saling terkait dan terstruktur untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom. Dengan otonomi ini, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMInya sendiri sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar pendirian, jumlah program studi, dan sumber daya yang tersedia, tanpa intervensi pihak luar. Sebagai contoh, SPMI yang diterapkan di universitas mungkin tidak sesuai untuk sekolah tinggi, dan SPMI di perguruan tinggi bertaraf internasional tidak selalu cocok diterapkan di perguruan tinggi lokal.

Meskipun setiap perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk mengembangkan SPMI secara mandiri, terdapat elemen penting yang harus dimiliki oleh SPMI di masing-masing perguruan tinggi. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang dikenal dengan singkatan PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Ini berarti bahwa kelima langkah tersebut harus ada dalam pelaksanaan SPMI dan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan pengertian 'internal' dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Contohnya, evaluasi terhadap penerapan Standar Dikti dalam SPMI suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga luar, meskipun lembaga tersebut

dianggap kredibel. Pihak eksternal dapat berperan dalam SPME, seperti melalui proses akreditasi, tetapi bukan dalam SPMI. Lima siklus kegiatan, yaitu PPEPP, dalam SPMI perguruan tinggi adalah proses penerapan Standar Dikti. Berdasarkan Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus diterapkan dalam SPMI adalah Standar Dikti, yang mencakup SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, serta Standar Dikti yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang melebihi SN Dikti.

SPM Dikti, yang mencakup SPMI dan SPME, harus berlandaskan pada PD Dikti. Ini berarti data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus sama dengan yang digunakan untuk SPME. Misalnya, jika evaluasi dalam SPMI menunjukkan bahwa persentase dosen bergelar Magister adalah 70%, angka tersebut harus tercermin dalam PD Dikti. Data ini juga akan digunakan dalam SPME atau akreditasi. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu membangun PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan terkini, yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan Standar Dikti dalam SPMI, serta dapat dimanfaatkan oleh BAN-PT atau LAM untuk proses akreditasi.

Tujuan dan fungsi Sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). (Gofur, Qomusuddin, and Romlah 2023).

Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu: pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki beberapa tujuan utama yang penting

untuk pengembangan pendidikan tinggi: Meningkatkan Kualitas Pendidikan: SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan di perguruan tinggi, seperti pengajaran, penelitian, dan layanan kepada mahasiswa, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SPMI berkontribusi langsung dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Menjamin Relevansi Kurikulum: Salah satu tujuan SPMI adalah memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat serta industri. Hal ini penting agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: SPMI dirancang untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di perguruan tinggi. Dengan melakukan evaluasi rutin, institusi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder: Dengan meningkatkan mutu pendidikan, SPMI bertujuan untuk meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Kepuasan ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Memastikan Akuntabilitas: SPMI juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Proses dan hasil penjaminan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholder, sehingga membangun kepercayaan dalam institusi.

Pada Pasal 67, ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (Sakarinto 2020) Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah: meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan sarana untuk

memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

SPMI memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung pencapaian tujuannya: Pengendalian Mutu: SPMI berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan memantau mutu pendidikan di perguruan tinggi. Ini mencakup pengawasan terhadap pengajaran, penelitian, dan layanan kepada mahasiswa untuk memastikan standar mutu dipenuhi. Evaluasi dan Audit: Melalui evaluasi berkala dan audit internal, SPMI membantu menilai pencapaian standar mutu. Proses ini memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diikuti secara konsisten. Pengembangan Kebijakan: SPMI berfungsi dalam pengembangan kebijakan dan prosedur yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap elemen institusi dalam melaksanakan tugas mereka.

## 2. Peran Organisasi dalam implementasi SMPI

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan keterlibatan aktif berbagai organisasi di dalam institusi. Salah satu organisasi kunci dalam proses ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki tanggung jawab utama untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. (Amalia et al. 2023) Dengan menjalankan fungsi ini, LPM berperan sebagai pengarah dalam penjaminan mutu, memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang diterapkan selaras dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, LPM juga bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan mutu yang diinginkan.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi memerlukan peran aktif berbagai organisasi yang ada di kampus. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan dan mempertahankan kualitas pendidikan yang terus berkembang. Dalam konteks ini, terdapat beberapa organisasi

yang memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi SPMI.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengembangkan kebijakan mutu di tingkat perguruan tinggi. LPM berperan sebagai pengarah dalam penyusunan standar mutu yang relevan dengan visi dan misi institusi. Selain itu, LPM juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diterapkan untuk memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut dengan standar yang berlaku.

LPM bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SPMI, seperti penetapan standar mutu, pelaksanaan evaluasi, serta pengendalian dan peningkatan mutu. Dengan peran tersebut, LPM menjadi lembaga sentral yang mengarahkan perguruan tinggi untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dan mengembangkan standar yang melampaui batas tersebut untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. (Widiantoro and Yodi 2020)

Unit Penjaminan Mutu (UPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang berada di tingkat fakultas atau program studi yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi standar mutu pendidikan di tingkat operasional. UPM bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis terhadap pencapaian standar mutu, dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada LPM untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. (Rahmatul Aini et al. 2021)

UPM juga berperan dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data, UPM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam proses perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

Fakultas dan program studi memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi SPMI, karena mereka adalah pelaksana langsung standar mutu dalam proses pembelajaran. Setiap fakultas dan program studi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun tetap relevan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri.

Selain itu, fakultas dan program studi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh LPM dan UPM. Dosen dan tenaga pendidik juga memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan dapat mendukung capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam implementasi SPMI. Organisasi ini mencakup berbagai unit kegiatan yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional mahasiswa, serta menjadi saluran penting dalam memberikan feedback dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang ada. (Rosdiyanti and Khairunnisah 2022)

Beberapa organisasi kemahasiswaan yang terlibat langsung dalam SPMI adalah: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM): Sebagai representasi mahasiswa di tingkat universitas atau fakultas, BEM memiliki peran dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa mengenai kebijakan pendidikan dan layanan kampus. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ): Bertanggung jawab untuk pengembangan akademik di tingkat jurusan atau program studi. HMJ dapat memberikan masukan kepada pihak fakultas dan prodi mengenai kebutuhan dan harapan mahasiswa terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): Organisasi ini berperan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa, serta membentuk karakter mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan berbagai organisasi di dalam perguruan tinggi baik yang bersifat struktural seperti LPM dan UPM, maupun yang berbasis pada minat dan bakat mahasiswa seperti BEM, HMJ, dan UKM sangat menentukan keberhasilan implementasi SPMI. Sinergi antara lembaga formal dan organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus akan menghasilkan sistem penjaminan mutu yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari pimpinan perguruan tinggi, SPMI dapat diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas

tinggi dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara berbagai organisasi di perguruan tinggi, termasuk LPM, UPM, fakultas, mahasiswa, dan pimpinan, sangat penting untuk keberhasilan implementasi SPMI. Dengan kerja sama yang baik dan keterlibatan aktif dari semua pihak, SPMI dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. (Sulartopo, Danny Manonga 2019) Hal ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat melalui lulusan yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

### 3. Tantangan dan solusi sistem penjaminan mutu internal

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari semua pihak, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pentingnya SPMI, sulit untuk menciptakan budaya mutu yang kuat di dalam institusi. Untuk mengatasi masalah ini, perguruan tinggi perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai tujuan dan manfaat SPMI. Pelatihan dan workshop dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan semua elemen dalam proses penjaminan mutu. (Admin Sevima 2020)

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga kerja. Seringkali, perguruan tinggi tidak memiliki cukup anggaran untuk melaksanakan program-program penjaminan mutu secara efektif. Selain itu, kurangnya staf yang terlatih dalam bidang penjaminan mutu dapat mengakibatkan implementasi yang tidak optimal. Solusinya adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan penjaminan mutu dan memperkuat pelatihan bagi staf. Kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, juga dapat membantu mendapatkan sumber daya tambahan dan keahlian yang diperlukan.

Tantangan ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa individu atau kelompok di perguruan tinggi mungkin

merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan untuk mengadopsi metode baru yang diusulkan dalam SPMI. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan implementasi. (Razab Isdendi, Sulastri, and Kustiawan 2023) Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan, rasa memiliki dapat ditumbuhkan, sehingga lebih mudah menerima perubahan yang diperlukan. Selain itu, menunjukkan manfaat langsung dari perubahan tersebut dapat membantu mengurangi resistensi.

Evaluasi dan pengukuran efektivitas SPMI juga menjadi tantangan yang signifikan. Pengumpulan data yang akurat dan relevan seringkali menjadi kendala, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana standar mutu telah tercapai. (Ragil, Meilani, and Akbar 2020) Untuk mengatasi masalah ini, perguruan tinggi perlu mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk pengumpulan dan analisis data. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu mempermudah proses ini, serta memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan.

Akhirnya, tantangan dalam menjaga keberlanjutan SPMI menjadi perhatian penting. Banyak perguruan tinggi yang memulai program penjaminan mutu dengan semangat tinggi, tetapi seiring waktu, perhatian dan sumber daya mulai menurun. Untuk menjaga keberlanjutan, penting untuk menetapkan mekanisme evaluasi berkala dan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan semua elemen dalam proses pengembangan dan evaluasi, serta memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu, SPMI dapat terus berjalan dan berkembang sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terencana, tantangan dalam implementasi SPMI dapat diatasi, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui organisasi di perguruan tinggi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai organisasi, seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM), berperan aktif dalam merancang,

melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan mutu. Keterlibatan semua elemen, termasuk dosen, mahasiswa, dan pimpinan, sangat penting untuk menciptakan budaya mutu yang kuat. Meskipun tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan ada, dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, SPMI dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

##### B. Saran

Artikel yang membahas tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi ini masih terbatas dan masih membutuhkan banyak masukan dan saran dari pembaca. Sehingga penulis sangat menerima masukan yang membangun guna mengembangkan tulisan tentang sistem penjaminan mutu ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Sugiyono. 2023. "PENTINGNYA PENYELARASAN SPMI DAN SPME DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI." *JURNAL MATEMAR: MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI MARITIM*. <https://doi.org/10.59225/matemar.v2i1.67>.
- Admin Sevima. 2020. "Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi." *Sevima.Com*.
- Amalia, Nur, Laila Qadriah, Fitriyani Fitriyani, and Junaidi Salat. 2023. "PENGEMBANGAN APLIKASI MONITORING EVALUASI BELAJAR PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS JABAL GHAFUR MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL." *Jurnal Real Riset*. <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i1.1101>.
- Gofur, Huliman Abdul, Ivan Fanani Qomusuddin, and Siti Romlah. 2023. "Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.290>.
- Harahap, Muhammad Syahril, Syawal Gultom, Darwin, Rosnelli, and Nur Hidayah Fithriyah. 2023. "KAJIAN IMPLEMENTASI SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) SEKOLAH DAN PERGURUAN

- TINGGI DI INDONESIA." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*.  
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4616>.
- Hardadi. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Marjohan, Marjohan, Lusi Englita, and Mustika Lukman. 2023. "Pengaruh Iklim Organisasi, Budaya Organisasi, Kepemimpinan Terhadap Motivasi Dosen Akademi Maritim Sapta Samudra Padang." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*.  
<https://doi.org/10.36057/jips.v7i1.564>.
- Mulyasa, E., and Wiwik Dyah Aryani. 2022. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Era Merdeka Belajar." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.  
<https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.933-944.2022>.
- Najwa, Lu'luin, Muhammad Iqbal, and Menik Aryani. 2023. "Manajemen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.33394/vis.v11i1.7391>.
- Ragil, Yoga Aditia, Sri Martini Meilani, and Zarina Akbar. 2020. "Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.420>.
- Rahmatul Aini, Siti, Yayuk Ndayani, Agus Dwi Ananto, Yohanes Juliantoni, and Iman Surya Pratama. 2021. "GAMBARAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM." *Unram Medical Journal*.  
<https://doi.org/10.29303/jku.v9i4.488>.
- Razab Isdendi, Rio, Winda Sulastri, and Dedi Kustiawan. 2023. "IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI AMIK CITRA BUANA INDONESIA KOTA SUKABUMI." *JURNAL BUANA INFORMATIKA CBI*.  
<https://doi.org/10.53918/jbicbi.v13i1.81>.
- Rosdiyanti, Evi, and Noni Antika Khairunnisah. 2022. "ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU IKIP MATARAM (Studi Kasus LPMI IKIP Mataram)." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*.  
<https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4163>.
- Sakarinto, Wikan. 2020. "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi." *Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi*.
- Sulartopo, Danny Manonga, Albert Kriestian NAN. 2019. "Sistem Informasi Memori Organisasi Pada Sistem Penjaminan Mutu Internal." *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*.
- Widiantoro, Suryo, and Yodi Yodi. 2020. "Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal Berbasis IAPS 4.0." *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*.  
<https://doi.org/10.47927/jikb.v11i2.7>.